

**ANALISA KURIKULUM BERMUATAN MODAL SOSIAL
DALAM PEMBELAJARAN IPS DI MTS/SMP**

Ratna Puspitasari; Aris
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
ratnapuspitasari@syekhnurjati.ac.id, aris@syekhnurjati.ac.id

Abstrak

Pendidikan menjadi bentuk kegiatan bersinergi antara guru, murid, masyarakat dan pemegang kebijakan pendidikan. Sebagai bentuk kegiatan terpadu, pendidikan membutuhkan keterlibatan terpadu dari berbagai pihak yang terlibat yang terdiri dari pihak pemegang kebijakan di sekolah, para pendidik, karyawan atau tenaga administrasi, para siswa, wali muris atau orang tua, pihak komite sekolah, dan tentu pemerintah. Jika semuanya fungsional sesuai tugas dan peran masing-masing, maka pendidikan akan berjalan baik dengan hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Hampir bisa dipastikan bahwa lembaga pendidikan setingkat SMP/ MTs di Kota Cirebon yang maju dan berkualitas unggul disebabkan oleh adanya modal sosial yang kokoh di semua pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pendidikan itu. Selama kurun waktu sekarang ini hanya pendidik yang sering dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dan paling bersalah jika hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Padahal, sebagai salah satu bagian dalam lembaga pendidikan formal, banyak sekolah yang memiliki keunggulan modal sosial yang mampu menggerakkan majunya pendidikan. Di saat efek globalisasi melanda semua dimensi dari manusia pendidikan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat pembelajar di Cirebon, sikap acuh tak acuh dan individualisme semakin mengental, terbaikannya hak-hak komunal, longgarnya ikatan-ikatan yang ada di masyarakat ,tergerusnya modal sosialsehingga diperlukan strategi yang adaptif dan sesuai agar kondisi bangsadan masyarakat Indonesia makin terangkat sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia dengan penuh percaya diri. Salah satu upaya yang ditempuh adalah bagaimana menumbuhkembangkan penguatan modal sosial.

Kata Kunci: *kurikulum, modal, sosial*

Abstract

Education is a form of synergy between teachers, students, the community and holders of education policies. As a form of integrated activity, education requires integrated involvement of various parties involved consisting of policy holders in schools, educators, employees or administrative personnel, students, guardians of the muris or parents, the school committee, and of course the government. If everything is functional according to their respective duties and roles, then education will run well with results that are consistent with the goals of education. It is almost certain that advanced and high-quality SMP / MTs

education institutions in Cirebon City are caused by the existence of solid social capital in all parties that are directly or indirectly related to the educational activities. During this time only educators are often regarded as the responsible and most guilty parties if the results of education disappoint the community. In fact, as a part of formal education institutions, many schools have the advantage of social capital that is able to drive the advancement of education. When the effects of globalization hit all dimensions of human education as happened in the learning community in Cirebon, indifference and individualism increasingly thickened, neglected communal rights, loosening of existing ties in society, eroded social capital so that adaptive strategies were needed and according to the condition of the nation and Indonesian society to be increasingly elevated in line with other nations in the world with confidence. One of the efforts taken is how to develop strengthening social capital.

Keywords: curriculum, capital, social

A. PENDAHULUAN

Kurikulum dalam pembelajaran IPS lebih mengacu pada karakteristik peserta didik, perkembangan ilmu dan teknologi pada zamannya juga mengarah pada karakteristik siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejaman yang berpihak pada kebutuhan masyarakat di kota Cirebon. Tujuan kelembagaan mengandung makna yang sama dengan visi dan misi sekolah atau madrasah setingkat SMP/MTs. Pengembangan kurikulum selamanya sesuai dengan tujuan lembaga atau visi dan misi SMP/MTs karena penyusunan kurikulum adalah upaya mencapai target atau tujuan sekolah. SMP/MTs memiliki visi dan misi yang mampu menyiapkan peserta didik agar siap mengikuti tahapan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga hal yang menyangkut analisa disiplin ilmu sebagaimana pemahaman mengenai fakta, konsep, teori dan aspek lain menjadi lebih sesuai dibanding dengan penentuan isi kurikulum melewati analisis tugas maupun analisa pekerjaan. Dengan demikian, maka visi dan misi SMP/MTs selayaknya menjadi acuan utama dalam menentukan isi kurikulum. Hasilnya, pengalaman belajar yang dilakukan siswa di tingkat SMP/MTs, berupaya menjamin pencapaian tujuan lembaga pendidikan tersebut.

Hal yang berkaitan dengan proses perkembangan kurikulum di SMP/MTs adalah modal sosial yang menjadi sumber daya sosial dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh sebab itu, modal

sosial dipahami sebagai salah satu bagian utama dalam menggerakkan kerjasama, mobilitas ide, saling percaya maupun saling menghasilkan guna mencapai kemajuan bersama.

Menurut Hasbullah (2006, p.45), modal sosial merupakan sumber daya yang memiliki makna bahwa komunitas masyarakat bukan menjadi produk atau hasil dari pencapaian pertumbuhan ekonomi, namun menjadi prasyarat kondisi terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi (Putnam, 1995 ; dalam Champlin, 1999: 1304). Modal sosial memiliki tiga bagian penting yaitu: saling percaya (*trust*), saling menguntungkan (*reciprocal relationship*) dan jejaring sosial (*networking*). Individualisme merubah tatanan masyarakat global sebagaimana yang terjadi pada dunia pendidikan di Kota Cirebon. Kalangan remaja setingkat SMP/MTs lebih banyak melakukan kegiatan hedonis daripada melestarikan nilai gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Di sisi lain, pengembangan kurikulum bermuatan modal sosial belum pernah diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas-kelas IPS diantaranya kegotongroyongan dan musyawarah. Oleh sebab itu penyusun berupaya meneliti **ANALISA KURIKULUM BERMUATAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBELAJARAN IPS DI MTS/SMP SE KOTA CIREBON** dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan kurikulum dalam pembelajaran IPS di MTs/SMP se kota Cirebon?
2. Bagaimana muatan pembelajaran IPS berbasis modal sosial dalam pembelajaran IPS di MTS/SMP se kota Cirebon?
3. Bagaimana analisa kurikulum bermuatan modal sosial dalam pembelajaran IPS di MTS/SMP se kota Cirebon?

B. KAJIAN TEORI

Coser (2001) menjelaskan bahwa persepsi Durkheim mengenai fakta sosial adalah suatu ciri atau sifat sosial yang kuat yang tidak harus dijelaskan pada level biologi dan psikologi, tetapi sebagai sesuatu yang berada secara khusus di dalam diri manusia. Dengan kata lain, Ritzer menjelaskan bahwa fakta sosial, dalam teori Durkheim itu bersifat memaksa karena mengandung struktur-struktur yang berskala luas misalnya hukum yang melembaga. Pengaruh fakta sosial itu pun

tampak dalam karyanya mengenai bunuh diri di mana persoalan yang pokok di situ ialah apa motivasi, latar belakang dan alasan seseorang melakukan tindakan tersebut, atau mengapa beberapa orang cenderung melakukan tindakan itu (bunuh diri). Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan fakta sosial adalah bukan sesuatu yang tampak seperti itu saja, melainkan motif-motif atau dorongan sosial yang menimbulkan sesuatu itu terjadi di dalam realitas sosial (Hallen, 2012).

Dalam kerangka itu, istilah *sui generis* menjadi suatu terminologi sosial yang sangat kuat dalam teori Durkheim. Masih terkait dengan fakta sosial, semua gejala yang tampak itu bagi Durkheim tidak bisa dipahami secara *sui generis*, atau *taken for granted*, atau dipahami apa adanya secara langsung. Suatu fakta yang *sui generis* bukanlah suatu fakta yang harus diterima begitu saja, termasuk penyimpangan moral seseorang tidak mesti dipahami secara *sui generis* (Putnam, 1995). Orang harus mampu melihat dorongan-dorongan psikologi, faktor-faktor biologis, dan sebagainya sehingga memunculkannya suatu bentuk perilaku moral seperti di atas.

Menurut Durkheim (1993), fakta sosial itu memperlihatkan adanya berbagai cara dan usaha manusia untuk membangun suatu komunitas, atau apa yang disebutnya masyarakat. Berbanding terbalik dengan pemikiran Durkheim, Tonnies (2009) melakukan pengamatan terhadap bentuk *gemeinschaft* (kekerabatan) dan *gesellschaft* (persekutuan masyarakat luas), Durkheim melihat pada bagaimana pola masyarakat membangun persekutuan itu sendiri.

Pada sisi ini, Durkheim berpendapat terdapat dua corak orang membangun komunalitas, yaitu secara organik (solidaritas organik) dan secara mekanis (solidaritas mekanik) (Hallen, 2012). Solidaritas organik itu suatu bentuk cara membangun komunitas dengan cara melihat pada latar belakang yang sama, dan terjadi secara spontan, tanpa melalui suatu rekayasa (*social engineering*). Berbeda dengan solidaritas mekanik yang terjadi karena faktor disengajakan atau diciptakan secara terencana (Hallen, 2012).

Hampir bisa dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang maju dan berkualitas unggul disebabkan oleh adanya modal sosial yang kokoh di semua

komponen yang terlibat dalam aktivitas pendidikan itu Schaefer, 1996). Selama ini hanya guru yang paling disorot sebagai pihak yang paling bersalah jika hasil pendidikan tidak memuaskan. Padahal, sebagai lembaga pendidikan sekolah juga memiliki modal sosial yang bisa menjadi kekuatan penggerak memajukan pendidikan.

Ketika mengenalkan istilah “modal sosial”, Emile Durkheim membayangkan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis hanya bisa dicapai manakala antarwarga masyarakat itu saling berhubungan dengan baik melalui jaringan dan kesamaan nilai yang tumbuh di masyarakat itu dengan lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan yang ada (Francois, 2003). Nilai-nilai itu terus dijaga sebagai kekuatan yang mengikat, sehingga menjadi kekuatan tersendiri yang bermanfaat tidak saja untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, tetapi juga untuk menangkis berbagai upaya yang mengancam kohesivitas mereka (Francois, 2003). Apa yang dimaksudkan sebagai masyarakat oleh Durkheim tentu masyarakat dalam arti luas, termasuk masyarakat pendidikan.

Dalam konteks modal sosial ini, kesamaan lebih ditonjolkan daripada perbedaan. Ini tidak mudah, karena itu, diperlukan upaya penyadaran dari tokoh atau pemimpin masyarakat bahwa tatkala masyarakat ingin mencapai tujuan bersama maka ego dan kepentingan pribadi selayaknya ditanggalkan dulu (Fukuyama, 1995). Masyarakat harus disadarkan bahwa ada tujuan bersama yang hanya bisa dilakukan jika warga merasa dalam sebuah ikatan kuat untuk menjalankan peran secara bersama-sama. Ada “*others*” dan “*otherness*” yang bisa diperankan kelebihan-kelebihannya dan selanjutnya dihargai (Fukuyama, 1995).. Kuncinya eksistensi orang dihargai.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul Analisa Kurikulum Bermuatan Modal Sosial dalam Pembelajaran IPS di MTs/SMP se-Kota Cirebon menggunakan metode kualitatif, untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial dengan obyek penelitian SMP/ MTs se Kota Cirebon dengan mengambil sampel di empat sekolah terdiri MTs Al Hidayah GUPPI, SMP Negeri 12, MTs Negeri 2, dan MTS Madinnatunnajah. Objek kajian penelitian kualitatif dalam penelitian ini seringkali

bersifat kasuistik dengan sampel yang ditentukan secara purposif (sengaja atau dengan pertimbangan) tanpa mewakili populasi dengan mempertimbangkan kemampuan sampel atau informan dalam menyampaikan informasi secara lebih detail dan lengkap pada peneliti.

Creswell (dalam Herdiansyah, 2010: p.8), menyebutkan:

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting”.

Penelitian dengan metode kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi berakar dari tradisi berlandas filosofi maupun psikologi dan berpusat pada pengalaman (*experience*) pembelajar di lingkungan pendidikan setingkat SMP dan MTs se Kota Cirebon. Pendekatan fenomenologi menggunakan pengalaman pengembangan kurikulum PIPS menjadi alat dalam memahami secara mendalam tentang politik, sosial budaya maupun konsep kurikulum yang terjadi di Kota Cirebon. Penelitian pengembangan kurikulum IPS ini mengupas objek kajian penelitian yaitu modal sosial dengan member pemahaman utama terkait pengalaman sebuah fenomena. Peneliti mengkaji secara intens terkait pengalaman yang dijelaskan oleh informan terhadap subyek kajian penelitian. Pemaknaan dilakukan dengan memasuki 2awasan yang dipersepsikan oleh informan dengan melihat pengalaman kehidupan serta fenomena pemaknaan pengalaman informan terkait kajian modal sosial dalam pembelajaran IPS sebagaimana kajian Edmund Husserl dan Alfred Schultz. Pengaruh berbeda dari Weber lebih menekankan *verstehen* sebagai bentuk pemahaman interpretative terhadap pemahaman para pembelajar IPS terhadap modal sosial di sekolah masing-masing.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Kurikulum dalam Pembelajaran IPS di MTs/SMP se Kota Cirebon

Jumlah satuan pendidikan di kota Cirebon adalah sebagai berikut: terdapat sejumlah 45 SMP dan 12 MTs . Peneliti menggunakan sampel 4 sekolah dengan

analogi random sampling Berdasarkan hasil survey di MTs GUPPI, SMP Negeri 12, MTs Negeri 2 dan MTs Madinnatunnajah menunjukkan terdapat kesamaan persepsi di kalangan pembelajar IPS bahwa kondisi sosial masyarakat kota Cirebon terus mengalami perubahan signifikan, dinamisasi kemajuan di berbagai aspek yang mampu dilihat dan dimaknai oleh lembaga pendidikan sehingga menjadi bahan materi pembelajaran yang secara formal dituangkan dalam bentuk kurikulum. Landasan Filosofis Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran IPS di tingkat SMP/MTs se Kota Cirebon mengacu pada:

(1) Esensialisme

Merupakan sebuah aliran yang menekankan bahwa kurikulum harus menekankan pada penguasaan ilmu. Proses pembelajaran yang diterapkan adalah bagaimana peserta didik mampu menguasai disiplin ilmu pengetahuan sosial. Guru lebih dominan dalam proses pembelajaran ini.

Studi di lapangan menunjukkan bahwa dari keempat sampel yang diambil menunjukkan terdapat tiga di antara empat sekolah yang berkompetensi mengembangkan aspek kemampuan berpikir siswa yaitu di SMP Negeri 12, MTs Negeri 2 dan MTs Madinnatunnajah.

Penjelas diatas dikuatkan wawancara dengan Ja'far Kepala MTs Negeri 2 bahwa:

“ Sekolah kami dengan kapasitas 700 orang siswa yang mayoritas adalah anak-anak dari kalangan menengah ke bawah pada awalnya lebih mengembangkan kemampuan aspek kognitif. Siswa bias menerima materi pembelajaran saja itu sudah hal yang lebih. Mayoritas siswa kami adalah anak buruh penambang pasir galian C sehingga sekolah lebih diutamakan cukup bisa baca tulis dan menghitung. Karena sesudah menyelesaikan tingkat pendidikan MTs biasanya anak-anak didik tidak melanjutkan ke sekolah di atasnya.”

Wawancara dengan Sunarsih, pendidik di SMP N 12 juga menguatkan pendapat di atas:

“Anak-anak yang bersekolah di sini cenderung cukup sekolah saja. Latar belakang ekonomi orang tua yang kebanyakan pas-pasan mengajarkan bahwa sekolah itu harus bias baca tulis dan bias ngitung sehingga nanti kalo bias kerja di bangunan maupun rumah tangga tidak bisa ditipu orang.”

(2) Perenialisme

Perennialisme; adalah aliran yang berfokus pada transfer budaya (*transfer of culture*) sebagaimana terdapat pada implementasi kurikulum IPS yang berfokus pada pengembangan dan membangun jati diri bangsa siswa guna mencapai integrasi bangsa.

(3) **Progresivisme**

Merupakan aliran yang berpendapat bahwa sekolah bertujuan mengasah kecerdasan praktis yang membuat siswa melalui pengalamannya mampu memecahkan masalah yang disampaikan pendidik maupun masyarakat di kelas maupun di lingkungan sekitarnya.

(4) **Rekonstruksionisme**

Merupakan aliran yang berupaya mengarahkan sekolah pada penelitian atau *inquiry* mendunia, agar siswa dalam pembelajaran mampu menemukan (*inquiry*) yang menyeluruh pada aspek demokrasi. Hasil penemuan *informative* dengan menekankan pada proses pembelajaran sehingga dibutuhkan aktivitas aktif dalam pembelajaran.

Sumber Kurikulum di keempat lokasi penelitian meliputi empat komponen utama, diantaranya sebagaimana di bawah ini:

- a. Hasil analisis pekerjaan dan kehidupan orang dewasa,
- b. Kajian teori kurikulum Bobbit bersumber pada pengetahuan, sikap, nilai dan ketrampilan yang bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya.
- c. Unsur kebudayaan, terdiri berbagai disiplin ilmu, nilai, adat istiadat dan perilaku siswa.
- d. Kebutuhan peserta didik meliputi perkembangan dan minatnya.
- e. Nilai-nilai diantaranya pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya sebagai sumber penyusunan kurikulum berikutnya.
- f. Kekuasaan sosial politik

2. Muatan Pembelajaran IPS Berbasis Modal Sosial dalam Pembelajaran IPS di MTS/SMP se Kota Cirebon

Berdasarkan survey di empat lokasi wilayah penelitian yaitu di MTS Al Hidayah GUPPI, SMP Negeri 12, MTs Negeri 2 dan MTs Madinnatunnajah pada dasarnya ada beberapa muatan pembelajaran IPS berbasis modal sosial yang

dikembangkan masing-masing sekolah. Di MTs GUPPI, muatan religiusitas lebih diutamakan dengan memulai doa bersama sebelum pembelajaran dan di akhir jam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara di MTs Guppi:

“Modal sosial kami tidak menonjol, tetapi berusaha menjalin komunikasi yang baik, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Seorang guru dapat berkomunikasi maupun berinteraksi dengan baik pada sesama teman guru, dapat menumbuhkan rasa percaya satu sama lain. Guru membangun rasa saling percaya dengan para siswanya melalui kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler yang dibimbing oleh guru. “

Sementara itu di SMP Negeri 12 muatan modal sosial lebih difokuskan pada lingkungan hidup. Kepedulian pada lingkungan hidup meliputi adanya kegiatan mengelola kehidupan bersih, *green school* dan gerakan penanaman pohon di lahan kritis. Diawali dengan adanya perubahan pola pikir di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat luas menjadi penting dalam penguatan modal sosial. Perubahan pola pikir berpengaruh pada perubahan sikap mental yang berperan dalam transformasi sosial yang berkaitan dengan perubahan nilai, keyakinan dan pembiasaan.

Kesediaan dalam mengubah sikap individu diiringi rekonstruksi system pendidikan yang lebih kondusif, dengan masuknya konsep dan praktek modal sosial pada kurikulum sekolah melalui tiga komponen yaitu jaringan kerja sosial, norma sosial dan sanksi.

Melalui jaringan kerja sosial, penguatan siswa dilakukan melalui akses informasi. Melalui norma-norma sosial penguatan aturan yang positif menuju kerjasama positif. Melalui sanksi sosial diberikan melalui *reward* dan *punishment*. Pengembangan modal sosial di lingkungan keluarga, sekolah maupun sosial lainnya sangat menentukan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang berperan dalam pengembangan kurikulum IPS. Hal utama adalah modal kepercayaan masyarakat yang tinggi hingga mendorong muncul aksi sosial (*social action*) dalam menghadapi persoalan di masyarakat sebagai laboratorium pembelajaran IPS.

3. Analisa Kurikulum Bermuatan Modal Sosial dalam Pembelajaran IPS di MTS/SMP se Kota Cirebon

Hasil survey di ke empat sekolah menunjukkan bahwa pada dasarnya modal sosial memiliki tiga komponen pokok yaitu *trust* (saling percaya), saling menguntungkan (*reciprocal relationship*) serta jejaring sosial (*networking*). *Trust* dimaknai sebagai saling kepercayaan lembaga pendidikan dengan masyarakat pengguna. Penerapan kurikulum pembelajaran IPS merupakan bentuk implementasi kurikulum pembelajaran IPS dalam upaya merencanakan sampai tindakan operasional. Evaluasi Kurikulum menjadi fase akhir dari pengembangan kurikulum IPS dalam penjabaran hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program perencanaan serta hasil-hasil kurikulum PIPS.

Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Didi Efendi kepala sekolah MTs Al Hidayah Guppi sebagai berikut:

“MTs Al Hidayah Guppi Kota Cirebon menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP 2006. Himbuan Kemendikbud dan Kemenag menyebut bahwa Kurtilas lebih baik dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Kurtilas ditetapkan di sekolah ini sejak 2017/2018. Sebenarnya pada tahun 2014/2015 pernah diterapkan namun baru satu semester dihentikan dan kembali menggunakan KTSP dan pada tahun 2017/2018 kembali diterapkan secara bertahap. Penerapan kurikulum terbaru di sekolah ini diterapkan secara bertahap dari kelas 7, kemudian kelas 8 dan terakhir kelas 9.”

Implementasi kurikulum IPS di lembaga pendidikan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sangat memungkinkan terjadinya penggunaan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan kurikulum di lembaga pendidikan lainnya sehingga digunakan beberapa prinsip berikut: (1) prinsip-prinsip umum meliputi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas praktis dan efektivitas (2) prinsip-prinsip khusus meliputi prinsip yang berkaitan tujuan pendidikan IPS, pemilihan isi pendidikan IPS, pemilihan proses hasil belajar IPS, pemilihan media dan abahan ajar, serta pemilihan kegiatan penilaian IPS.

E. KESIMPULAN

Pendidikan IPS di SMP/MTs se Kota Cirebon pada dasarnya telah diorganisir sebagai IPS terpadu yang berimplikasi pada tugas guru dalam mengajar IPS. Tujuan kelembagaan terdapat pada visi misi sekolah sehingga kurikulum pembelajaran IPS disusun untuk mencapai tujuan sekolah.

Pengembangan kurikulum selamanya sudah sesuai dengan visi misi sekolah Pengembangan isi kurikulum IPS dilakukan melalui analisa pekerjaan (*job analysis*) bukan melalui disiplin ilmu.

Sebaliknya, sekolah yang memiliki visi misi dalam menyiapkan peserta didik yang mampu mengikuti pendidikan ke jenjang lebih tinggi maka analisis disiplin ilmu yang terdiri pemahaman fakta, konsep, teori sangat sesuai dibanding penentuan isi kurikulum melalui nalaisis tugas. Sehingga, pengalaman pembelajaran IPS yang dilakukan siswa di sekolah mampu menjamin pencapaian tujuan sekolah tersebut.

REFERENSI

- Abdullah, Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 76.
- Adam, Frane. 2003. "*Sosial Capital: Recent debates and research trends*".*Sosial science information*. London: SAGE Publication.
- Brumbaugh. Lawrence. 1963. *Philosophers on Education six Essays on The Foundations of Western Thought*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Charles Schaefer, 1996, *Cara Efektif Mendidik dan Mendisiplinkan Anak*, Jakarta: Mitra Utama.
- Clide, Gordon. 1951.*Piecing Together The Past The Interpretation of Archaeological Data*, New York: F A Prager.
- Cleere, Henry. (1989). *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Council for British Archaeology.
- Depdiknas, 2007. Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 2007.
- Dikdasmen. 2013. Kurikulum IPS 2013. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyasa, Pengembangan dan Impelementasi Kurikulum 2013. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hal.164.
- Fukuyama, F. 1997. *Sosial Capital and The Modern Capitalist Economy: Creating a High Trust Workplace Stren Bussiness Magazine vol. 4 no 1*.

- Fukuyama F. 2001. Social Capital, Civil Society, and Development. *Third World Quarterly*, 22(1):7-200.
- Ha, Seong Kyu. 2010. *Housing Sosial Capital and Community Development in Seoul. Cities* 27 (2010).
- Harthana, Timbuktu dan Ignatius Sawabi 2010."Suku Bangsa Ini Bernama Cirebon". Kompas
- Hasbullah, J. 2006. Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR United Press.
- Jones S. 2003. *Community Based Ecotourism the Significance of Social Capital Tourism Research* Vol. 32 No 2.
- Jones, N. 2010. *Environmental Actifation of Citizen in The Context of policy Agenda Formation and the Influence of Social Capital. The Social Capital Journal*. Vol 47
- Kassa, A. 2009. Effects of Different dimension of Social Capital on Inovative Activity: Evidance from Europe at Regional Level. *Technovation* 29, pp: 218-233.
- Kelly. 1989. *The Curriculum. Theory and Practice*. London. Paul Chapman Publishing.
- Kemendikbud. 2013. Kurikulum 2013 SMP/MTs mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta: Kemendikbud.
- Khrisna. 1999. *Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watershed in Rajasthan India. Sosial Capital Inisiative Working paper No. 13. The World Bank*.
- Lesser. 2000. Knowledge and Social Capital: Fondation andApplication, Boston-Boutterwhorth-Heinneman.
- Licon, Thomas 1992, *Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Nahapit, J. Dan Ghoshal, S. 1998. Sosial Capital, intellectual Capital, and the Organizational Advantage. *The Academy of Management Review*, 23 (2).
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, cet. 7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 27.

Putnam, Robert D. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. The American Prospect No. 13 Spring.

NCSS, 2000. *National Standar for Social Studies Teachers :Executive Summary*. [Online]. Tersedia :<http://www.socialstudies.org/standards/execsummary>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Ansori, A., 2011. *52 Kajian Kebijakan Kurikulum IPS*. (Online). Tersedia :<http://www.slideshare.net/Dwijosusilo/52-kajian-kebijakan-kurikulum-ips>.

Ardhian, T., 2011. *Landasan Kurikulum IPS*. (Online).